

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1.

Nama Unit Organisasi

:

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2.

Urusan Bidang

:

PKK
2.

Tugas

:

Memberikan Pelayanan Administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.
3.

Fungsi

:

a.

Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia

b.

Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia

c.

Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota

d.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	1. Terselainya beberapa perkara yang menyangkut kepentingan hukum Pemprov/Gubernur, pemenuhan HAM dan Indeks Pembangunan Hukum	Dokumen	1. Persentase gugatan yang menyangkut kepentingan hukum Pemprov/Gubernur dan nilai indeks laporan RANHAM mencapai Target	1. $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	Data sidang perkara gugatan yang dimenangkan oleh Pemprov Sumsel, Laporan RANHAM hasil penilaian dari kemenkum HAM dan Laporan pembangunan Hukum	Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel
2.	Sasaran : Terpenuhinya Layanan Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota, Penyelesaian Masalah Hukum dan Penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan	2. Terselainya penegakan hukum peraturan daerah 3. Terselainya penetapan produk hukum daerah Provinsi/Kab./Kota yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Dokumen Dokumen	2. Persentase Penegakkan Hukum Peraturan Daerah 3. Jumlah produk hukum Pemerintah Provinsi/Kab/kota yang telah ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi	2. $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ 3. $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sesuai target.	Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel

Palembang,

2026

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DEDI HARAYAN, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP

Penjabat Tk. II (IV/b)

NP.197809072007011005